

FESTIVAL FILM MELAWAN BUDAYA KETERTUTUPAN

Donny Kurniawan¹, Amin Shabana², Irvan Fadhilah³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

donny.kurniawan@umj.ac.id

Abstrak

Sikap ketertutupan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia pasca reformasi lebih dari 20 tahun lalu. Sebagai salah satu anak kandung dari reformasi, kebebasan berekspresi bertransformasi dalam berbagai wajah kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari praktik penyelenggaraan festival film khusus yang mengadvokasi isu pertentangan sebagai identitasnya di beberapa negara dan Indonesia.. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah film festival dan ketertutupan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi. Sementara mengumpulkan data melalui studi pustaka dan internet. Penyelenggaraan festival film termasuk tumbuh dengan cepat di berbagai wilayah dan tingkatan oleh penggiat perfilman. Bagi negara yang kuat penghargaannya terhadap isu Hak Asasi Manusia, festival film merupakan pendobrak sikap tertutup yang dibangun penguasa untuk melindungi kepentingannya dari isu-isu yang dianggap berbahaya. Berbagai penyelenggaraan festival film yang ada di Indonesia saat ini masih didominasi sebagai ruang apresiasi suatu karya film. Sementara di negara lain, festival film digunakan sebagai gerakan advokasi untuk mengubah keadaan yang dinilai penuh tidak keadilan. Meskipun jumlahnya sedikit di Indonesia, festival film yang berani mengusung semangat “perlawanan” tersebut juga menghadapi berbagai kendala untuk terus bertahan.

Kata kunci: *Festival Film, Hak Asasi Manusia, Perlawanan, Sikap Ketertutupan*

FILM FESTIVAL AGAINST SECRECY CULTURE

Abstract

Secrecy remains a significant challenge faced by the Indonesian people after the reformation broke out about 20 years ago. As mandated by reformation itself, freedom of expression transforms into various facets of people's lives. . The purpose of this research is to outline issue based-film festivals in several countries and Indonesia. The main theories used in this research are film festivals and secrecy. This research uses a descriptive qualitative method with content analysis technique. While collecting data through literature review and internet. The organization of film festivals keeps growing rapidly in varied-regions and levels by film activists. In countries where strongly hold Human Rights appreciation, the film festival is a breakthrough against the secrecy attitude for years. A number of today's film festivals, in Indonesia context, is still dominated as a space to exhibit selected-films. While in other countries, film festivals are used as an advocacy movement to change the unfair situation. Although very few numbers in Indonesia, the film festival embodied the spirit of "resistance" also faces various obstacles to survive

Keywords : *Advocacy, Film Festival, Human Right, Secrecy*

PENDAHULUAN

Paska reformasi, meski fluktuatif terjadi peningkatan kuantitas jumlah produksi film

diikuti oleh jumlah penonton dalam kurun 10 tahun terakhir. Perkembangan jumlah film dan penonton dipantau secara khusus dalam laman *filmindonesia.or.id*. Selain yang bersifat angka,

perkembangan industri film nasional dari berbagai perspektif juga menjadi kajian menarik bagi peneliti media maupun akademisi perfilman. Perkembangan isi cerita film pernah ditulis oleh (Mubarak, 2016) (Mubarak, 2016; Rozi & Hasan, 2018) dan (Makhasi, 2018). Kajian lainnya mengupas potensi industri film nasional sebagai bagian dari industri kreatif (Putri, 2017) dan (Luthfi, 2018).

Pengaruh reformasi pada sektor perfilman sebenarnya bukan selalu menyoal kuantitas produksi film dan angka penonton semata. Dampak lain yang juga dirasakan yaitu tumbuh-kembangnya kegiatan perfilman saat ini. Berbagai kegiatan perfilman tersebut berupa kegiatan pameran, apresiasi dan kajian film di berbagai tingkatan. Kehadiran komunitas film, *cine club* dan penggiat perfilman merupakan oksigen bagi kemajuan film Indonesia. Mereka hadir di tengah dominasi pemain besar dan pemilik modal industri perfilman. Khusus komunitas film kehadiran mereka dikaji oleh (Suwardi, 2017) dan (Agustina, 2017) dalam perannya memperluas distribusi alternatif film-film Indonesia.

Bentuk lain dari kegiatan perfilman di berbagai tingkatan dan daerah yaitu festival film. Kota Yogyakarta layak dijadikan yang terdepan dalam penyelenggaraan festival film. Setidaknya ada tiga festival film terlama dan terbesar dibanding kota lainnya yaitu Jogja Netpac Asian Film Festival (JAFF), Festival Film Dokumenter (FFD) dan Festival Film Pelajar Jogja (FFPJ). Bahkan beberapa kajian kegiatan perfilman yang ada cenderung lebih banyak meneliti kegiatan festival film yang ada di kota gudek ini seperti yang dilakukan oleh (Suwanto, 2017) (Permatasari, 2014) (Puspitasari, Saptia, & Permana, 2018) (Aryanto, 2017) dan (Arifianto & Junaedi, 2017).

Sayangnya dari berbagai penyelenggaraan festival film yang ada, sebagian besar merupakan ruang apresiasi karya film sebagai produk seni dan budaya. Masih sangat sedikit festival film yang mengangkat isu khusus

sebagai identitas utama festival dalam membela kepentingan publik. Pada banyak negara yang memiliki penghargaan isu Hak Asasi Manusia, festival film dijadikan identitas perlawanan terhadap berbagai sikap tertutupan dan ketidakadilan sosial yang dirasakan. Kebebasan berekspresi dan berpendapat disalurkan melalui rangkaian pemutaran film, diskusi dan advokasi dalam menyuarakan perubahan kepada negara dan lingkungan sekitar. Konsistensi atas isu yang diangkat menjadikan beberapa festival film jenis ini menjadi sirkuit dunia bagi film-film yang mengangkat tema marginalisasi dari berbagai belahan dunia.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek penyelenggaraan festival film khusus yang mengadvokasi isu perlawanan di beberapa negara dan Indonesia. Teori utama yang digunakan penelitian ini yaitu festival film dan tertutupan.

Kabut Budaya Tertutupan

Pemenuhan kebebasan berekspresi merupakan mandat yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. (Selian & Melina, 2018). Sayangnya gagasan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sikap tertutupan yang muncul berpotensi menghambat praktek kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat. Kajian tentang masih kuatnya sikap tertutupan tetap terjadi di banyak negara dan bidang. Praktek budaya tertutupan tersebut antara lain di korporasi (Houque, Monem, Tareq, & van Zijl, 2016), seni budaya dan masyarakat (Lightsey & Long, 2003), kesehatan (Hardon & Posel, 2012), politik (Birchall, 2011) dan pemerintahan (Henninger, 2018).

Merujuk pada teori seminal Tertutupan dari ahli sosiologi Georg Simmel (1906) dinyatakan bahwa sebagai makhluk sosial dalam melakukan hubungan yang beraneka ragam dan kontekstual sangat terkait dengan sikap pengungkapan kebenaran dan penyembunyian. (dalam Hardson dan Posel, 2012:S4)

Untuk melawan sikap tertutupan, maka harus menggunakan budaya keterbukaan yang ditawarkan oleh Jürgen Habermas (Vermeir & Margócsy, 2012). Merujuk konsep Habermas, Ateşman mengungkapkan bahwa ruang publik memediasi antara masyarakat dan negara, di mana publik mengorganisir dirinya sebagai pembawa opini publik. (Ateşman 2016: 116). Sementara itu kebebasan berekspresi dan berpendapat sendiri dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Festival Film

Meski tergolong baru, kajian tentang festival film terus dikembangkan oleh para peneliti dunia (Rüling et.al, 2010) (Iordanova et.al, 2010). Artikel ilmiah ini sendiri menggunakan konsep festival film dari Marijke de Valck (2016). Menurutnya festival film datang dengan berbagai ukuran dan rasa. Ukuran adalah salah satu elemen pembeda yang paling jelas. Biasanya jumlah film yang ditampilkan, jumlah pengunjung, dan pengorganisasian anggaran. Parameter lain yang perlu dipertimbangkan adalah daya jangkauan festival. Festival besar dengan skala internasional, menargetkan penonton lokal (nasional) dan internasional. Untuk menggelar festival film internasional banyak hal yang harus dipenuhi baik oleh penyelenggara maupun kota tuan rumah. Ada juga Festival film yang disebut sebagai "festival berbasis identitas" karena pemilihan tematik film yang diprogram untuk festival yang melibatkan pertanyaan identitas dan masalah representasional yang menyangkut komunitas dan kelompok tertentu. (de Valck et.al, 2016: 2-3).

Penelitian ini hanya membahas jenis festival berbasis identitas yang diutarakan de Valk et.al di atas. Untuk kategori ini, Iordanova dan Ruby Cheung kemudian membagi festival film menjadi tiga kelompok dikaitkan dengan komunitas yang terlibat. Pertama, festival yang dibangun di atas agenda supranasional tertentu, seperti Franchophone, Arab, Ibero-Amerika, Mediterania, festival film Pan Afrika dan Arab.

Kedua, festival yang menyoroti pembangunan identitas dalam konteks perjuangan berkelanjutan untuk menyatukan populasi yang tersebar dalam membangun kenegaraan misalnya Festival film Kurdi atau meningkatkan kesadaran misalnya Festival film Gipsi. Ketiga, festival yang mempromosikan agenda politik dengan tujuan menumbuhkan pemahaman dan kebersamaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda (Iordanova et.al 2010: 22). Dalam tulisan lainnya, Iordanova hanya membagi 2 kelompok, yaitu Pertama, festival arus utama yang diharapkan memberikan paparan dan ruang yang sangat baik untuk film berbasis isu misalnya Cannes, Berlin, Sundance dll. Selanjutnya, festival yang bersifat inklusif, dokumenter dan hak asasi manusia misalnya IDFA, Hot Docs di Toronto, AFI-Discovery Channel Silverdocs dll.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis*. Sementara pengumpulan data melalui studi pustaka. Data primer diperoleh dari jurnal dan buku. Sementara untuk data khusus festival film yang ada di Indonesia, penulis menggunakan data sekunder dari internet karena keterbatasan informasi yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Festival Film Sebagai Bentuk Perlawanan

Belajar dari yang terjadi di berbagai negara, praktek penyelenggaraan festival film berbasis isu merupakan simbol perlawanan dari kelompok yang merasa termajinalkan oleh suatu sistem atau nilai umum yang ada di masyarakat atau negara. Penyelenggara kegiatan festival ini biasanya aktivis, penggiat atau pemerhati isu yang sedang diadvokasi melalui penyelenggaraan festival film.

Perbedaan festival film “perlawanan” ini dengan festival film *mainstream* terletak pada identitas isu yang diangkat sebagai misi festival. (Mariagiulia Grassill 2012:37). Pembangunan identitas ini juga dinilai sangat penting saat berbicara kepada anggota yang setia dengan komunitas agar bersatu dalam melawan prasangka pihak lain (Iordanova and Cheung 2012:5). Tentu saja bentuk perlawanan tersebut dapat diidentifikasi melalui berbagai isu yang dikembangkan. Beberapa isu tersebut antara lain perjuangan suku asli (Amalia Cordova: 63), memerangi kemiskinan, perbudakan dan pemenjaraan, diskriminasi atas dasar ras dan orientasi seksual, perlindungan bumi dari ekstraksi industri yang berlebihan dan merusak, dan banyak lagi. (Dina Iordanova 2012: 23).

Seperti halnya festival film, penyelenggara festival juga melakukan kurasi dari setiap film yang akan diputar. Meski kualitas sinematik masuk sebagai kriteria penilaian, namun akurasi faktual dan kebenaran dari cerita memiliki porsi lebih yang menjadi pertimbangan para *programmer* festival film berbasis isu ini. (Leshu Torchin 2012:3). Selain pemutaran film,

mobilisasi dukungan juga dibangun melalui diskusi dan sesi tanya jawab yang biasanya menghadirkan pelaku, pakar dan pihak berwenang dari isu yang sedang dibahas. Pemutaran keliling atau *roadshow* juga dilakukan untuk memperluas target penonton dan dukungan dari kampanye yang dilakukan. Semua karakteristik festival film “perlawanan” di atas terjadi pada berbagai penyelenggaraan festival film di dunia, termasuk Indonesia. Hanya saja Cini dibanding negara lain. Selain terlambat, penyelenggaraan festival masih sangat minim. Beberapa festival yang memiliki identitas isu kuat seperti LGBT dan anti korupsi tidak mampu bertahan dengan alasan berbeda. Selain terbatasnya dukungan pemerintah, yang menjadi catatan atas kendala yang dihadapi antara lain promosi, akses pendanaan, dukungan publik dan jejaring dengan sirkuit festival film internasional. Berikut adalah beberapa festival film yang berbasis isu perlawanan di berbagai dunia. Indikator festival yaitu yang sudah pernah dilaksanakan lebih dari 2 kali penyelenggaraan secara berkala (De Valk: 2016) dan bukan diselenggarakan oleh pemerintah:

Tabel 1. Beberapa Festival Film “Perlawanan” dunia dan Indonesia (data dari berbagai sumber)

Isu	Negara	Nama Festival	Tahun Berdiri	Penyelenggara / Pendiri	Status
Hak Asasi Manusia	Republik Ceko	One World Festival	1999	People In	V
	New Zealand	New Zealand Human Right Film Festival	2004	Need *	*
	Amerika, Swiss, Kanada, Kenya, Inggris, Belanda	Human Rights Watch International Film Festival	1989	Human Rights Watch	V
	Amerika	Human Rights Watch International Film Festival	1985		V
	Belanda	Human Rights Watch International Film Festival	1995	The Vermont International Flm	V
	Argentina	The Vermont International Flm Festival	1997	Amnesty International	*
	Bolivia	The Vermont International Flm Festival	2004	*	V

	Ethiopia Jepang Bahrain Bologna Geneva Rwanda Indonesia	Movies That Matter Festival Derhumalc Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos Addis Ababa Film Festival The Refugee Film Festival Bahrain Human Rights Film Festival Human Rights Nights FIFDH The Rwanda Film Festival Festival Film Papua	2006 2007 - 2013 2002 2004 2017	The Bolivia International Human Rights Festival Initiative Africa UNHCR Bahrain Human Rights Nights Association FFIDH Foundation The Rwandan Cinema Centre Papuan Voice	V V - V V V V
Lingkungan	Skotlandia India	Uist Eco Film Festival Voice from the Waters	2011 2006	* Bangalore Film Society	* V
Politik	Zagreb, Kroasia Indonesia	Subversive Film Festival Anti Corruption Film Festival*	2008	* KPK, TII	V V
LGBT	Amerika Amerika Italia Inggris Israel Amerika	The Frameline Festival Outfest Torino GLBT Film Festival London Lesbian and Gay Film Festival tlvfest.com	1977 1982 1985 1986 2006 1987	Frameline Outfest Ottavio Mai and Giovanni Minerba Pureland Foundation Yair Hochner	V V V V V V

	Jerman Hong Kong	MIX NYC	1989 1989	Sarah Schulman and Jim Hubbard	V V
	Indonesia	Lsf-hamburg-de Hklgff.hk	2002	Querbild e.V Hong Kong Lesbian & Gay Film Festival Society. Q-Munity	*
Suku Asli <i>Terdapat 65 festival film di seluruh dunia (Corodova201 2: 73)</i>	Amerika	The American Indian Film Festival	1975	Michael Smith- The American Indian Film Institute	V V
	Kanada		1991		*
	Amerika	The Aboriginal Film and Video Arts Alliance	1993	the Alliance *	V
	Meksiko		1985		V
	Meksiko	Two Rivers Native American Film and Video Festival	2002	Clacpi Festival Internacional del Cine en Morelia	V
	Indonesia	Clacpi Morelia International Film Festival	2018	Ranu Welum Foundation *	V *
		Kalimantan Indigenous Film Festival			
		Festival Film Perdamaian Dunia			
Disabilitas	Jerman	We Live	2009	*	*
	Inggris	International Short Film Festival	1999	*	*
	Australia	London Disability arts Festival	2004	Arts Access Victoria	V
	Rusia		2010	Perspektiva	V
	Amerika	The Other Film Festival	1970	Magnes Collection of Jewish Art and Life, Contemp orary Jewish Museum	V
	Yunani	Breaking Down Barriers Film Festival	*		*
	Kanada	SUPERFEST International	2001	*	V
	Jerman		*		*

	Indonesia	Disability Film Festival Emotion Pictures Picture This KynnysKINO Festival Film Dsabilitas	2014	the Calgary SCOPE Society * *	*
Perdagangan Manusia	Inggris Raya Taiwan India Nigeria Inggris	Unchosen Anti-Human Traficking Film Festival Of Inhuman Bondage Na Wa Film Festival Bitahrfilmforum.org	2008 2010 2009 2011 2010	* * * * *	* * * * *

Keterangan:

*: Tidak teridentifikasi/Terhenti penyelenggaraannya pada saat penyusunan tulisan ini

Penyelenggaraan festival film “Perlawanan” di seluruh dunia menghadapi kesulitan dalam mengubah permasalahan yang dihadapi. Festival film sebagai ruang publik yang inklusif merupakan forum edukasi masyarakat untuk kritis dan terlibat dalam isu yang sedang diadvokasi. Perjalanan panjang berbagai festival film berbasis isu ini telah menemukan jalannya dalam memperluas dampak yang dihasilkan. Nilai jejaring yang dibangun baik dengan festival sejenis maupun dengan festival yang lebih besar merupakan modal sosial yang penting demi mewujudkan perubahan yang diinginkan. Khusus Indonesia, festival film yang berafiliasi dengan festival film dunia juga tergolong terbatas.

Bagi suatu festival film, keberlanjutan penyelenggaraan merupakan tantangan yang harus ditaklukan. Keterlibatan penonton merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan festival untuk terus bertahan. Untuk meningkatkan jumlah penonton, berbagai festival film dunia juga menggunakan strategi jemput bola dengan melakukan *road show* keliling ke kota, desa hingga ruang kelas.

Sehingga kemitraan dengan berbagai organisasi *civil society*, lembaga pendidikan, guru, komunitas hingga sukarelawan dapat memperkuat arah advokasi yang dijalankan. Tidak hanya di bioskop, tetapi juga di rumah sakit jiwa, pusat penahanan, universitas dan taman. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan festival dengan masyarakat dan untuk menumbuhkan minat terhadap hak asasi manusia di seluruh wilayah. Mobilisasi dukungan yang besar ini yang akan membangun “Perlawanan” lebih besar. or

Hanya saja membangun kemitraan tersebut juga memiliki harga yang harus dibayar mulai dari penolakan kekerasan hingga ancaman yang sifatnya kriminal. Bila salah dalam melakukan pendekatan, penyelenggaraan festival film selama bertahun-tahun tidak akan mampu mempertahankan dirinya sebagai agen perubahan yang kritis dan dinamis dalam memperjuangkan cita-cita kelompok atau masyarakatnya. Praktek inilah yang saat ini dihadapi oleh pihak internal maupun eksternal penyelenggara festival dalam menyuarakan aspirasi publiknya.

SIMPULAN

Banyak festival film yang dijadikan simbol perlawanan di berbagai dunia. Festival film kategori ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Pertama, pelaksanaan festival film baik di negara lain maupun di Indonesia memiliki tantangan besar untuk dapat terus berjalan. Beberapa festival yang tidak mampu bertahan karena keterbatasan berbagai sumber daya yang dibutuhkan, baik yang bersifat material maupun non material.
- b. Sumber pendanaan menjadi faktor penting bagi festival film dalam melakukan penyebarluasan atau memperoleh dukungan terhadap kampanye yang diperjuangkan.
- c. Festival film merupakan *meeting point* atau *hub* yang menghubungkan para pencari informasi yang terdiri dari para pemangku kepentingan antara lain penggiat isu, pembuat film, pakar, penguasa dan publik tempat kunci informasi tambahan yang menghubungkan;
- d. Festival film “perlawanan” merupakan tempat yang baik bagi lokasi pengembangan kapasitas para pembuat film / aktivis serta kekuatan yang cukup kuat berdampak Iordanova.
- e. Minimnya dukungan otoritas regional/lokal, bisnis maupun industri film sendiri, membuat penggiat festival film berafiliasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dan berfungsi dalam kaitannya dengan berbagai kelompok dan penyebab masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, A. (2017). Membaca Pasar Film Indie Lewat Film “SITI” Karya Edi Cahyono. *Journal of Urban Society's Arts*. <https://doi.org/10.24821/jousa.v4i1.14>

86

- Arifianto, B. D., & Junaedi, F. (2017). Distribusi dan Eksibisi Film Alternatif di Yogyakarta, Resistensi atas Praktek Dominasi Film di Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i2.61>
- Aryanto, I. K. (2017). Jaringan Tata Kelola Festival Film di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12(2), 161–174. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i2.468>
- Birchall, C. (2011). Introduction to ‘Secrecy and Transparency’: The Politics of Opacity and Openness. *Theory, Culture & Society*. <https://doi.org/10.1177/0263276411427744>
- Cordova, Amalia. (2012). Towards an Indigenous Film Festival Circuit. In *Film Festival Yearbook 4: Film Festivals and Actisim*. ST. Andrew Print and design. UK
- De Valck, Marijke; Kredell, Brendan; Loist, S. (2016). *Film Festivals theory, method, practice. Book*.
- Dina Iordanova and Ruby Cheung. (2010) *Film Festival Yearbook 2: Film Festivals and Imagined Communities* Edited by Dina Iordanova with Ruby Cheung 2010
- Grasilli, Mariagiulia (2012) *Human Right Film Festivals: Global/Local Networks for Advocacy*. In *Film Festival Yearbook 4: Film Festivals and Actisim*. ST. Andrew Print and design. UK
- Hardon, A., & Posel, D. (2012). Secrecy as embodied practice: Beyond the confessional imperative. *Culture, Health and Sexuality*. <https://doi.org/10.1080/13691058.2012.726376>
- Henninger, M. (2018). Reforms to counter a culture of secrecy: Open government in Australia. *Government Information Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.03.003>
- Houqe, M. N., Monem, R. M., Tareq, M., & van Zijl, T. (2016). Secrecy and the impact of mandatory IFRS adoption on earnings quality in Europe. *Pacific Basin Finance Journal*.

- <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2016.08.002>
- Jordanov, Dina. (2012). Film Festivals and Dissent: Can Film Change The World in Film Festival Yearbook 4: Film Festivals and Actisim. ST. Andrew Print and design. UK
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586>
- Lightsey, S., & Long, P. O. (2003). Openness, Secrecy, Authorship: Technical Arts and the Culture of Knowledge from Antiquity to the Renaissance. *The Sixteenth Century Journal*. <https://doi.org/10.2307/20061706>
- Loist, S & Zielinski. (2012). On the Development of Queer Film Festivals and Their Media Activism. In Film Festival Yearbook 4: Film Festivals and Actisim. ST. Andrew Print and design. UK
- Luthfi, A. (2018). Pendidikan Seni Film dan Televisi Menjadi Penggerak Industri Ekonomi Kreatif. *REKAM: Jurnal Fotografi, Televisi, Dan Animasi*. <https://doi.org/10.24821/rekam.v13i2.1933>
- Makhasi, G. Y. M. (2018). Citra Kepahlawanan dalam Film-Film Berlatar Sejarah Pada Layar Lebar Indonesia Pasca-Runtuhnya Rezim Soeharto (Studi Kasus Film Soegija, Habibie-Ainun, dan Hadrotussyaiikh Sang Kiai). *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*. <https://doi.org/10.22146/diplomatika.39768>
- Mitchel, D & Snyder Sharon. (2012). Permutations of The Species: Independent Disability Cinema and the Critique of National Normativity. . In Film Festival Yearbook 4: Film Festivals and Actisim. ST. Andrew Print and design. UK
- Mubarak, M. (2016). Muslim Sosial Dalam Dua Film Nurman Hakim. *ULTIMART Jurnal Komunikasi Visual*. <https://doi.org/10.31937/ultimart.v6i1.368>
- Permatasari, A. (2014). *Festival Film Sebagai Arena Sistem Terbuka Studi Kasus Pada Festival Film Dokumenter (FFD) Dan Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF)*. Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Puspitasari, L., Saptya, R., & Permana, M. (2018). Marketing Communication Strategy of National Indie Movies : A Case Study of Yogyakarta Indie Movies Literature Review Marketing. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 24–31.
- Putri, I. P. (2017). INDUSTRI FILM INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI INDUSTRI KREATIF INDONESIA. *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*. <https://doi.org/10.25124/liski.v3i1.805>
- Rozi, R. F., & Hasan, R. V. (2018). PARA HARIMAU YANG MENOLAK PUNAH: ESTETIKA DOKUMENTER TELEVISI DI ERA PASCAREFORMASI. *Journal of Urban Society's Arts*. <https://doi.org/10.24821/jousa.v5i1.2195>
- Rüling, C. C., & Strandgaard Pedersen, J. (2010). Film festival research from an organizational studies perspective. *Scandinavian Journal of Management*. <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2010.06.006>
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>
- Suwardi, A. K. (2017). *Studi Kasus Distribusi Film Independen Oleh Buttonijo. Skripsi. Universitas Airlangga*.
- Suwarto, D. H. (2017). Penonton Festival Film di Yogyakarta. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 14(1), 75. <https://doi.org/10.24002/jik.v14i1.889>
- Torchin, Leshu. (2012) Networked for advocacy: Film Festival and activism. in Film Festival Yearbook 4: Film Festivals and Actisim. ST. Andrew Print and design. UK

Torchin, Leshu. (2012) Traffic Jam Revisited: Film Festivals, Activism and Human Trafficking. in Film Festival Yearbook 4: Film Festivals and Activism. ST. Andrew Print and design. UK

Journal for the History of Science.
<https://doi.org/10.1017/S0007087412000052>

Vermeir, K., & Margócsy, D. (2012). States of secrecy: An introduction. *British*